



Strategi Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Lingkungan dalam Mangatasi Sampah Jalanan di Kota Tangerang Selatan

Raihan Nabil As Sya'Bany¹, Reihan Ahmad Maulana², Qofifah Pujawati³, Rulinawaty⁴

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: raaihannabil2004@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 07, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 13, 2026

Keywords:

Environmental Communication, Policy Advocacy, Street Waste. Governance, South Tangerang City

ABSTRACT

This study examines environmental communication strategies and policy advocacy implemented by South Tangerang City Government in addressing the street waste crisis during the 2025 Waste Management Emergency Status. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, this research analyzes government communication patterns, public responses, and advocacy dynamics in strengthening environmental governance. Data were collected through in-depth interviews with government officials, environmental activists, waste bank managers, and affected communities, as well as document analysis of regulations, policy decisions, and media reports. The findings reveal that government communication strategies during the crisis were predominantly top-down and information-oriented, with limited public participation and weak integration with community-based initiatives. Policy advocacy efforts were mainly conducted at the bureaucratic level without sufficient mobilization of public support, resulting in reactive and short-term policy responses. This study concludes that the lack of integration between participatory environmental communication and inclusive policy advocacy has reduced the effectiveness of waste management interventions. Strengthening dialogical communication, community engagement, and public-based advocacy is essential to improving sustainable environmental governance in South Tangerang City.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 07, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 13, 2026

Kata Kunci:

Komunikasi Lingkungan, Advokasi Kebijakan, Sampah Jalanan, Tata Kelola Lingkungan, Kota Tangerang Selatan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi komunikasi lingkungan dan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani krisis sampah jalanan pada masa Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengkaji pola komunikasi pemerintah, respons masyarakat, serta dinamika advokasi kebijakan dalam penguatan tata kelola lingkungan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah, aktivis lingkungan, pengelola bank sampah, serta masyarakat di wilayah terdampak, dan diperkuat dengan analisis dokumen kebijakan serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah masih bersifat top-down dan berfokus pada penyampaian informasi, dengan



tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah. Di sisi lain, advokasi kebijakan lebih banyak berlangsung pada level birokrasi tanpa dukungan publik yang kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung reaktif dan berjangka pendek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terintegrasinya komunikasi lingkungan yang partisipatif dengan advokasi kebijakan yang inklusif menjadi hambatan utama dalam penanganan krisis sampah jalanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi dialogis dan advokasi berbasis dukungan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Raihan Nabil As Sya'Bany

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: raaihannabil2004@gmail.com

PENDAHULUAN

Krisis pengelolaan sampah di wilayah perkotaan telah bertransformasi dari sekadar isu sanitasi menjadi ancaman eksistensial terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sebagai salah satu kota penyangga utama Jakarta, saat ini berada di titik kritis dalam manajemen limbah padatnya. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, volume timbulan sampah pada tahun 2024 melonjak hingga mencapai 414.750 ton per tahun, atau setara dengan 1.136,30 ton per hari (Maheswara, 2025). Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kepadatan penduduk yang terus meningkat tidak dibarengi dengan kapasitas pengolahan sampah yang memadai di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang, yang secara teknis telah melampaui kapasitas tampung. Kondisi ini mencapai puncaknya pada akhir Desember 2025, di mana Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah melalui Keputusan Wali Kota Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 (Intan Afrida Rafni, 2025). Penetapan status ini dipicu oleh darurat sampah jalanan yang kian tidak terkendali di jalur-jalur protokol dan kawasan publik, yang tidak hanya merusak estetika kota tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang signifikan. Fenomena "sampah liar" atau sampah jalanan ini mencerminkan adanya *disconnect* antara pertumbuhan konsumsi masyarakat dengan kesadaran ekologis serta efektivitas pengawasan kebijakan di lapangan.

Dalam perspektif teori komunikasi lingkungan, masalah sampah di Tangsel bukan sekadar persoalan teknis pengangkutan, melainkan persoalan diskursus dan perilaku. Sebagaimana dikemukakan oleh (Shahreza, Mirza Sarwititi, Sarwoprasodjo Arifin, Hadi Susilo Hapsari, 2020), komunikasi lingkungan merupakan proses strategis untuk membangun pemahaman bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memitigasi krisis lingkungan. Di Tangerang Selatan, komunikasi yang dibangun selama ini masih bersifat satu arah (*top-down*) dan belum mampu menyentuh aspek perubahan perilaku yang fundamental. Kurangnya integrasi antara pesan pemerintah dengan realitas sosial di tingkat



akar rumput (seperti bank sampah) menyebabkan banyak kebijakan berhenti pada tahap sosialisasi tanpa implementasi yang konkret. Secara regulasi, Pemerintah Kota Tangsel sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang kuat, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mengamanatkan pengurangan sampah dari sumbernya dan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tembok besar berupa rendahnya kepatuhan publik dan lemahnya penegakan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan di jalanan.

Advokasi kebijakan dalam konteks ini berfungsi sebagai upaya terencana untuk memengaruhi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan agar memprioritaskan anggaran serta infrastruktur persampahan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mensinergikan strategi komunikasi yang mampu mengubah pola pikir masyarakat dengan advokasi kebijakan yang mampu mempercepat pengadaan solusi teknologi berkelanjutan (Salam et al., 2025). Tanpa adanya strategi komunikasi yang inklusif dan advokasi yang kuat, status tanggap darurat yang ditetapkan hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana integrasi antara strategi komunikasi lingkungan yang partisipatif dan advokasi kebijakan yang berbasis hasil dapat menjadi jalan keluar dari krisis sampah jalanan. Dengan menganalisis situasi darurat tahun 2025, studi ini bermaksud merumuskan kerangka kerja komunikasi dan advokasi yang dapat memperkuat tata kelola lingkungan di Kota Tangerang Selatan demi mewujudkan kota yang bersih dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan advokasi kebijakan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani krisis sampah jalanan. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana langkah-langkah komunikasi publik, sosialisasi kebijakan, serta praktik advokasi anggaran dan infrastruktur persampahan dijalankan selama masa Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah Tahun 2025, serta bagaimana strategi tersebut memengaruhi respons dan perilaku masyarakat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, perangkat kecamatan dan kelurahan di wilayah terdampak, pengelola bank sampah, aktivis lingkungan, serta masyarakat yang tinggal di kawasan yang mengalami penumpukan sampah jalanan. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, seperti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, Keputusan Wali Kota tentang Status Tanggap Darurat, laporan resmi Dinas Lingkungan Hidup, pemberitaan media massa, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan komunikasi lingkungan dan advokasi kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi pemerintah, arsip media, serta basis data ilmiah seperti Google Scholar dan Sinta.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik kualitatif. Tahap awal analisis dilakukan dengan mereduksi data untuk memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi komunikasi pemerintah, bentuk advokasi kebijakan, tingkat partisipasi



masyarakat, serta kendala implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Data yang telah direduksi kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti pola komunikasi pemerintah, respons publik, penegakan regulasi, dan dukungan kebijakan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara naratif untuk menggambarkan dinamika hubungan antara strategi komunikasi dan efektivitas kebijakan dalam konteks krisis sampah jalanan di Kota Tangerang Selatan. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana komunikasi dan advokasi kebijakan berkontribusi dalam mengatasi permasalahan sampah.

Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada istilah-istilah kunci, antara lain strategi komunikasi lingkungan, yang dimaknai sebagai upaya terencana pemerintah dalam menyampaikan pesan, membangun kesadaran, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah; advokasi kebijakan lingkungan, yang dipahami sebagai proses memengaruhi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi, anggaran, dan infrastruktur persampahan; serta sampah jalanan, yang merujuk pada timbulan sampah yang menumpuk di ruang publik, jalan protokol, dan kawasan permukiman akibat kegagalan sistem pengelolaan.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengelola komunikasi publik dan advokasi kebijakan dalam situasi krisis, serta sejauh mana strategi tersebut berkontribusi dalam membangun tata kelola pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks tata kelola lingkungan perkotaan, krisis sampah jalanan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 tidak hanya mencerminkan keterbatasan infrastruktur, tetapi juga memperlihatkan persoalan mendasar dalam strategi komunikasi publik dan advokasi kebijakan lingkungan. Sebagai kota penyangga Jakarta dengan tingkat urbanisasi dan konsumsi yang tinggi, Tangsel menghadapi tekanan sosial-ekologis yang semakin kompleks. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat serta bagaimana proses advokasi kebijakan mampu mengamankan dukungan politik dan anggaran yang diperlukan. Bagian ini membahas bagaimana strategi komunikasi dan advokasi kebijakan dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam merespons krisis sampah jalanan, bagaimana masyarakat meresponsnya, serta implikasinya bagi penguatan tata kelola lingkungan daerah.

Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Situasi Krisis

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengadopsi pendekatan komunikasi krisis setelah penetapan Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah pada akhir 2025. Strategi komunikasi difokuskan pada penyampaian pesan-pesan peringatan, imbauan, dan larangan melalui media sosial resmi pemerintah, baliho di ruang publik, serta surat edaran kepada kelurahan dan RT/RW. Pendekatan ini mencerminkan model komunikasi kebijakan yang bersifat instruktif dan hierarkis, di mana pemerintah bertindak sebagai sumber utama informasi dan masyarakat sebagai penerima pesan.



Dalam perspektif komunikasi lingkungan, pendekatan ini masih berada pada level penyampaian informasi (*information-based communication*) dan belum sepenuhnya berkembang menjadi komunikasi partisipatif yang mendorong perubahan perilaku (Shahreza, Mirza Sarwititi, Sarwoprasodjo Arifin, dan Hadi Susilo Hapsari, 2020). Meskipun pesan pemerintah cukup masif, kurangnya ruang dialog dan keterlibatan komunitas menyebabkan banyak warga memandang kebijakan tersebut sebagai tindakan administratif semata, bukan sebagai gerakan bersama untuk menyelamatkan lingkungan kota.

Kasus Penanganan Sampah Jalanan dan Makna Simbolik Kebijakan

Salah satu kasus yang menonjol selama masa darurat adalah tindakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menutup tumpukan sampah di beberapa ruas jalan protokol dengan terpal sambil menunggu pengangkutan. Secara teknis, langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi bau dan penyebaran sampah, tetapi secara komunikatif justru menimbulkan kontroversi di ruang publik. Banyak warga yang menafsirkan kebijakan ini sebagai upaya “menutupi masalah”, bukan menyelesaikannya.

Dalam kerangka komunikasi lingkungan, kebijakan tersebut lebih berfungsi sebagai simbol politik ketimbang instrumen perubahan perilaku. Tindakan fisik di ruang publik tanpa disertai narasi kebijakan yang jelas mengenai tanggung jawab masyarakat, mekanisme pemilahan, dan peran komunitas membuat pesan lingkungan kehilangan kekuatan persuasifnya. Hal ini menguatkan argumen Shahreza. (2020) bahwa komunikasi lingkungan yang efektif harus mampu menghubungkan kebijakan dengan nilai, makna, dan praktik sosial warga.

Tanggapan Masyarakat terhadap Strategi Komunikasi Pemerintah

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masyarakat Tangsel merespons kebijakan pemerintah dengan kombinasi antara kepatuhan pasif dan skeptisisme. Sebagian warga mengikuti imbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi banyak pula yang merasa bahwa pemerintah tidak menyediakan mekanisme yang jelas untuk berpartisipasi secara aktif. Komunitas pengelola bank sampah, misalnya, menyatakan bahwa mereka jarang dilibatkan dalam perumusan atau penyebaran kebijakan selama masa krisis.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam teori advokasi kebijakan, dukungan publik yang terorganisasi merupakan faktor kunci untuk mendorong keberlanjutan reformasi kebijakan (Salam, A., Rasyid, M., dan Kurniawan, D., 2025). Ketika masyarakat tidak merasa menjadi bagian dari solusi, maka tekanan sosial terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan struktural juga menjadi lemah.

Advokasi Kebijakan dan Dinamika Pengambilan Keputusan Pemerintah

Dari sisi pemerintah, krisis sampah jalanan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan advokasi internal, terutama dalam mendorong peningkatan anggaran, kerja sama dengan pihak swasta, serta rencana pengembangan teknologi pengolahan sampah. Namun, proses advokasi ini sebagian besar berlangsung di ranah birokrasi dan elite politik, tanpa disertai dengan mobilisasi opini publik.



Advokasi kebijakan lingkungan yang efektif seharusnya bersifat terbuka dan berbasis dukungan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Di Tangsel, keterpisahan antara advokasi birokratis dan komunikasi publik menyebabkan kebijakan yang lahir cenderung reaktif dan jangka pendek, bukan sebagai bagian dari reformasi tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Integrasi Komunikasi dan Advokasi sebagai Kunci Tata Kelola Lingkungan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan utama dalam menangani krisis sampah jalanan di Kota Tangerang Selatan terletak pada belum terintegrasinya strategi komunikasi lingkungan dan advokasi kebijakan. Pemerintah mengomunikasikan kebijakan tanpa melibatkan masyarakat sebagai aktor perubahan, sementara advokasi kebijakan dijalankan tanpa membangun dukungan publik yang luas.

Dalam perspektif komunikasi lingkungan, krisis ekologis seharusnya diposisikan sebagai isu kolektif yang membutuhkan kolaborasi antara negara dan warga (Shahreza, Mirza Sarwititi, Sarwoprasodjo Arifin, dan Hadi Susilo Hapsari, 2020). Ketika komunikasi dan advokasi berjalan secara terpisah, maka kebijakan kehilangan daya transformasinya dan hanya menjadi respons administratif terhadap situasi darurat.

Implikasi bagi Penguatan Tata Kelola Lingkungan Kota

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah jalanan di Kota Tangerang Selatan sangat bergantung pada kualitas strategi komunikasi dan advokasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu mentransformasikan komunikasi publik dari sekadar sosialisasi menjadi proses dialogis yang melibatkan komunitas, sekaligus memanfaatkan krisis sebagai momentum untuk membangun advokasi kebijakan yang berbasis dukungan sosial.

Dengan pendekatan ini, krisis tidak hanya menjadi masalah yang harus dipadamkan, tetapi juga peluang untuk membangun sistem tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif, legitim, dan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan dalam literatur komunikasi lingkungan dan advokasi kebijakan (Shahreza, Mirza Sarwititi, Sarwoprasodjo Arifin, dan Hadi Susilo Hapsari, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa krisis sampah jalanan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, tetapi juga oleh lemahnya integrasi antara strategi komunikasi lingkungan dan advokasi kebijakan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah merespons krisis melalui penetapan Status Tanggap Darurat serta berbagai langkah teknis dan komunikasi publik, namun strategi komunikasi yang diterapkan masih didominasi oleh pendekatan top-down dan berorientasi pada penyampaian informasi semata.

Minimnya ruang dialog dan keterlibatan masyarakat menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah kurang memperoleh legitimasi sosial dan tidak mampu mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan. Komunitas lokal, termasuk pengelola bank sampah dan masyarakat di wilayah terdampak, belum diposisikan sebagai aktor utama dalam proses



komunikasi dan implementasi kebijakan. Di sisi lain, advokasi kebijakan yang dilakukan pemerintah lebih banyak berlangsung di tingkat birokrasi dan elite politik, tanpa disertai mobilisasi dukungan publik yang kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan krisis lingkungan perkotaan, khususnya sampah jalanan, sangat bergantung pada integrasi antara komunikasi lingkungan yang partisipatif dan advokasi kebijakan yang inklusif. Pemerintah daerah perlu mentransformasikan komunikasi publik menjadi proses dialogis yang melibatkan masyarakat secara aktif, serta memanfaatkan momentum krisis sebagai sarana membangun dukungan sosial terhadap reformasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan demikian, krisis tidak hanya dipandang sebagai masalah darurat, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih legitim, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Intan Afrida Rafni, A. N. K. M. (2025). *Tangsel Tetapkan Status Tanggap Darurat Sampah hingga 5 Januari 2026*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/12/27/14485401/tangsel-tetapkan-status-tanggap-darurat-sampah-hingga-5-januari-2026>
- Maheswara, R. (2025). *Timbulan Sampah Tangerang Selatan 2024 Tembus 414.750 Ton*.
<https://dataloka.id/humaniora/5814/timbulan-sampah-tangerang-selatan-2024-tembus-414-750-ton/>
- Salam, R., Samudra, A. A., & Satispi, E. (2025). *Analysis of Waste Mitigation Policy in South Tangerang City, Indonesia: Challenges and Solutions for Sustainable Management*. 07(04), 157–175.
- Shahreza, Mirza Sarwititi, Sarwoprasodjo Arifin, Hadi Susilo Hapsari, D. R. (2020). Komunikasi lingkungan pengelolaan sampah environmenta communications waste management. *Penelitian Komunikasi*, 23(2), 113–128.
<https://doi.org/10.20422/jpk.v23i2.721>
- Rafni, I. A. (2025). *Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah*. Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (2019). *Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah*. Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- ANTARA News Banten. (2025, 25 Desember). *Pemkot Tangsel tetapkan status darurat sampah hingga 5 Januari 2026*. ANTARA News Banten.
- Mevin.ID. (2025, 28 Desember). *Tangerang Selatan darurat sampah! Pemkot tetapkan status tanggap darurat hingga Januari 2026*. Mevin.ID.
- VOI Indonesia. (2026, 7 Januari). *The Tangerang City Government extends the waste emergency status until January 19, 2026*. VOI Indonesia (English).



Portal Berita Kota Tangerang Selatan. (2025, 23 Desember). *Pemkot Tangsel tegaskan komitmen penanganan darurat sampah dan penghormatan hak warga Cipeucang*. Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Portal Berita Kota Tangerang Selatan. (2025, 17 Desember). *Pemkot Tangsel lakukan pengangkutan sampah secara bertahap, pastikan penanganan berjalan terkendali*. Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Jawapos.com. (2025, 27 Desember). *Tangsel darurat sampah! Berlaku hingga 2026, Kementerian Lingkungan Hidup minta bantuan Pemprov Banten*. JawaPos.com.